



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012-2017

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Musi Banyuasin.

8. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan Acuan Ukuran Kinerja oleh masing-masing unit kerja dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Indikator Kinerja Utama disingkat IKU, adalah Acuan Ukuran Kinerja tahunan daerah yang tersusun dalam bentuk dokumen pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah disingkat RPJM Kabupaten Musi Banyuasin adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017.

BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012–2017;
- (3) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar menyusun Indikator Kinerja Utama untuk SKPD-nya masing-masing, dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan ditetapkan oleh Pimpinan SKPD dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD;
- (4) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar menetapkan target kinerja setiap tahunnya dalam dokumen perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua;
- (5) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin setiap akhir tahun wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, untuk disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin c.q. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Musi Banyuasin dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
- (6) Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin diberikan tugas untuk :
 - a) Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Isi beserta uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. SOHAN MAJID

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 PERIODE 2012 -2017

No.	Urusan Pemerintahan / Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pertanian	1.1.1 Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan	1	Produktivitas padi pertahun	ton/ha	Distanak, BP2tanihut	Produktivitas padi pertahun adalah produksi tanaman padi per tahun (ton) dibagi Luas Areal tanaman padi per tahun (ha).
			2	Produktivitas jagung pertahun	ton/ha		Produktivitas jagung pertahun adalah produksi tanaman jagung per tahun (ton) dibagi Luas Areal tanaman jagung per tahun (ha).
2	Ketahanan Pangan	1.1.1 Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan	3	Penguatan cadangan pangan	% per tahun	BKP	Adalah jumlah cadangan pangan kabupaten dibagi dengan 100 ton dikalikan 100%.
			4	Skor pola pangan harapan (PPH)	%		Adalah jumlah energi dari setiap komoditas pangan dibagi dengan angka kecukupan gizi dikalikan 100%.
3	Pertanian	1.1.1 Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan	1	Produksi daging pertahun	ton per tahun	Distanak	Untuk menghitung capaian kinerja adalah jumlah realisasi produksi daging (ton) per tahun dibagi target produksi pertahun.
			2	Produksi telur pertahun	ton per tahun		Untuk menghitung capaian kinerja adalah jumlah realisasi produksi telur (ton) per tahun dibagi target produksi pertahun.
4	Kelautan dan Perikanan	1.1.1 Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan	3	Produksi perikanan pertahun	ton per tahun	Dinas Perikanan	Untuk menghitung capaian kinerja adalah jumlah realisasi produksi ikan (ton) per tahun dibagi target produksi pertahun.
5	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.2.1 Berkembangnya koperasi, usaha kecil, dan menengah	1	Koperasi aktif	%	Dinas Koperasi dan Pasar	Adalah jumlah koperasi yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi dikalikan 100 %.
			2	Jumlah usaha mikro dan kecil	unit		Adalah jumlah usaha mikro dan kecil yang masih beraktifitas.
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.2.2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	%	BPMPD	Adalah jumlah LPM berprestasi dibagi dengan jumlah seluruh LPM dikalikan 100 %.
			2	PKK aktif	klpk		Adalah jumlah PKK yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh PKK dikalikan 100%.
			3	Cakupan desa siaga aktif	%		Adalah jumlah desa siaga yang aktif di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah desa siaga yang dibentuk di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dikalikan 100%. Indikator kinerja ini juga menjadi salah satu alat ukur kinerja Dinas Kesehatan sesuai yang ada dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
7	Perindustrian	2.1.1 Berkembangnya industri kecil dan menengah yang mendukung peningkatan nilai investasi daerah	1	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Adalah jumlah industri kecil dan menengah tahun ini dikurangi jumlah industri kecil dan menengah tahun lalu dibagi dengan jumlah industri kecil dan menengah sampai dengan tahun lalu dikalikan 100%.
			2	Kapasitas Produksi Industri Kecil dan Menengah per tahun	%		Adalah jumlah produksi industri kecil dan menengah dalam setahun dibagi dengan jumlah produksi industri kecil dan menengah seharusnya dikalikan 100%.
8	Penanaman Modal	2.1.1 Berkembangnya industri kecil dan menengah yang mendukung peningkatan nilai investasi daerah	3	Peningkatan Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah	%	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Bappeda	Adalah nilai investasi industri kecil dan menengah tahun ini dikurangi nilai investasi industri kecil dan menengah tahun lalu dibagi dengan nilai investasi kecil dan menengah tahun lalu dikalikan 100%.
9	Perdagangan	2.1.2 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1	Unit usaha yang memiliki perizinan	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Adalah jumlah unit usaha yang memiliki perizinan dibagi dengan jumlah seluruh unit usaha dikalikan 100%.
			2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%		Adalah jumlah pedagang/usaha informal yang dibina dibagi dengan jumlah seluruh pedagan/usaha informal dikalikan 100%.

10	Ketenagakerjaan	2.1.3	Meningkatnya kapasitas ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja	1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adalah jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan 1.000. Angka ini menggambarkan jumlah angkatan kerja dari keseluruhan penduduk.
				2	Pencari kerja yang ditempatkan	%		Adalah jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikalikan 100%.
				3	Pengangguran terbuka	%		Adalah jumlah angkatan kerja yang benar-benar tidak bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100%.
				4	Keselamatan kerja dan hubungan industrial yang harmonis	%		Adalah jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) baik perjanjian bersama yang dibuat secara perseorangan/ individual atau perjanjian bersama massal dibagi dengan jumlah kasus yang dicatatkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dikalikan 100%.
11	Kebudayaan	2.2.1	Meningkatnya perlindungan budaya lokal	1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Adalah Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki pmda dikalikan 100%.
				2	Jumlah sanggar seni dan budaya yang aktif	klpk		Jumlah sanggar seni dan budaya yang aktif berkeaktifitas.
12	Pariwisata	2.2.2	Meningkatnya kualitas pariwisata daerah	1	Kunjungan wisatawan	orang/ tahun	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Adalah jumlah wisatawan domestik dan manca negara dalam setahun.
				2	Tempat wisata terpelihara setiap tahun.	%		Adalah jumlah tempat wisata yang terpelihara dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh tempat wisata dikalikan 100%.
13	Pekerjaan Umum	3.1.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan	1	Proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik	%	Dinas PU BM	Adalah panjang jalan kondisi baik/hotmik (km) dibagi dengan panjang jalan keseluruhan (km) dikalikan 100%.
				2	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk	Km		Adalah panjang jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk yang tersedia dalam kondisi baik. Untuk menghitung capaian adalah membandingkan antara panjang jalan penghubung yang tersedia dengan kebutuhan.
				3	Jumlah jembatan dengan kondisi baik terpelihara setiap tahun.	unit		Adalah jumlah unit jembatan dalam kondisi baik sesuai standar PU. Untuk menghitung capaian adalah membandingkan jembatan kondisi baik dengan seluruh jembatan yang ada.
				4	Proporsi panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air	%	Dinas PU CKP	Adalah panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km) dibagi dengan panjang seluruh jalan kabupaten (km) dikalikan 100%.
14	Perumahan	3.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman masyarakat	1	Persentase rumah layak huni	%	Dinas PU CKP	Adalah jumlah Rumah Layak Huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah dikalikan 100%.
				2	Rumah tangga pengguna air bersih	%		Adalah jumlah Rumah Tangga pengguna Air Bersih dibagi dengan jumlah Seluruh Rumah Tangga dikalikan 100%.
				3	Persentase Penduduk berakses air minum	%		Adalah jumlah penduduk berakses air minum dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100%.
				4	Rumah tangga pengguna listrik	%	Dinas Pertambangan dan Energi	Adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100%.
15	Penataan Ruang			5	Rumah ber-IMB	%	Dinas PU CKP	Adalah jumlah rumah ber-IMB dibagi dengan jumlah seluruh rumah dikalikan 100%.
				6	Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB	%	PU CKP dan Bappeda	Adalah luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber-HPL/HGB dikalikan 100%.

16	Perhubungan	3.1.3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	1	Rasio ijin trayek	per penduduk	Dinas Perhubungan	Adalah jumlah ijin trayek yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah penduduk.
				2	Kepemilikan KIR angkutan umum	unit		Adalah jumlah angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan KIR. Untuk menghitung capaian adalah membandingkan angkutan umum yang memiliki KIR dengan jumlah keseluruhan angkutan umum.
				3	Jumlah rambu-rambu yang tersedia dalam kondisi baik	unit		Jumlah rambu-rambu yang tersedia dalam kondisi baik atau sesuai standar perhubungan. Untuk menghitung capaian adalah membandingkan jumlah rambu-rambu yang tersedia dengan jumlah kebutuhan rambu-rambu sesuai peraturan.
17	Komunikasi dan Informatika	3.1.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	1	Jumlah jaringan telekomunikasi	titik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Adalah jumlah jaringan telekomunikasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik.
				2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	%		Adalah jumlah wartel/warnet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 1.000.
				3	Cakupan desa yang menerima informasi pembangunan daerah	%		Adalah jumlah desa yang menerima informasi pembangunan dibagi dengan jumlah seluruh desa dikalikan 100%.
				4	Cakupan daerah yang dilayani komunikasi dan informatika	kec.		Adalah jumlah desa yang mendapat layanan komunikasi dan informasi berupa jaringan radio.
18	Ketransmigrasian	3.1.5	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	1	Unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang terbina	%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adalah jumlah transmigran yang dibina dibagi dengan jumlah seluruh transmigran yang ada dikalikan 100%.
				2	Jumlah transmigran yang terbina	kk		Adalah jumlah transmigran yang dibina melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan atau bimbingan.
19	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.2.1	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya energi dan mineral daerah	1	Desa mendapat aliran listrik (Rasio elektrifikasi)	%	Dinas Pertambangan dan Energi	Adalah jumlah desa yang telah dialiri listrik dibagi dengan jumlah seluruh desa dikalikan 100%.
				2	Persentase perusahaan pertambangan yang tertib peraturan	%		Adalah jumlah perusahaan pertambangan yang tertib peraturan pertambangan dibagi dengan jumlah seluruh perusahaan pertambangan dikalikan 100%.
				3	Persentase penambangan liar yang ditertibkan	%		Adalah luasan lahan pertambangan liar yang ditertibkan dibagi dengan jumlah seluruh lahan pertambangan liar yang ada dikalikan 100%.
20	Lingkungan Hidup	3.2.2	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	1	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	%	Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan	Adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dibagi dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dikalikan 100%.
				2	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.	%		Adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dibagi dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi dikalikan 100%.
				3	Prosentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	%		Adalah luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dibagi dengan luasan lahan yang diperuntukan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dikalikan 100%. Luas lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan dan kawasan hutan tanaman (produksi), serta ruang terbuka hijau yang terdapat pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

				4	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	%		Adalah jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh instansi dalam setahun dikalikan 100%.
21	Kehutanan	3.2.3	Meningkatnya perlindungan kawasan hutan	1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	Dinas Kehutanan	Adalah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi dibagi dengan luas total hutan dan lahan kritis dikalikan 100%.
				2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	KPHP	Adalah luas Kerusakan Kawasan Hutan dibagi dengan Luas Kawasan Hutan dikalikan 100 %.
22	Pendidikan	4.1.1	Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat	1	Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km	%	Dinas Pendidikan Nasional	Adalah jumlah SD/MI yang berjarak maks 3 km dari permukiman penduduk dibagi dengan jumlah permukiman dikalikan 100%.
				2	Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km	%		Adalah jumlah SMP/MTs yang berjarak maks 6 km dari permukiman penduduk dibagi dengan jumlah permukiman dikalikan 100%.
				3	Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 orang	%		Adalah jumlah SD/MI yang setiap rombongan belajarnya maks 32 orang dibagi dengan jumlah seluruh SD/MI dikalikan 100%.
				4	Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 36 orang	%		Adalah jumlah SMP/MTs yang setiap rombongan belajarnya maks 36 orang dibagi dengan jumlah seluruh SMP/MTs dikalikan 100%.
				5	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	%		Adalah jumlah SD/MI yang setiap rombongan belajarnya memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis sesuai standar dibagi dengan jumlah seluruh SD/MI dikalikan 100%.
				6	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	%		Adalah jumlah SMP/MTs yang setiap rombongan belajarnya memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis sesuai standar dibagi dengan jumlah seluruh SMP/MTs dikalikan 100%.
				7	Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya	%		Adalah jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya sesuai standar dibagi dengan jumlah seluruh SD/MI dikalikan 100%.
				8	Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	%		Adalah jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dibagi dengan jumlah seluruh SD/MI dikalikan 100%.
				9	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	%		Adalah jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dibagi dengan jumlah seluruh SD/MI dikalikan 100%.
				10	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	%		Adalah jumlah SMP/MTs yang memiliki guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dibagi dengan jumlah seluruh SMP/MTs dikalikan 100%.
				11	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%		Adalah jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh SD/MI dikalikan 100%.

				12	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%		Adalah jumlah SMP/MTs yang memiliki guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh SMP/MTs dikalikan 100%.
				13	Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik	%		Adalah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh kepala SD/MI dikalikan 100%.
				14	Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik	%		Adalah jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh kepala SMP/MTs dikalikan 100%.
				15	Jumlah pengawas sekolah/madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik	%		Adalah jumlah pengawas sekolah/madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh pengawas sekolah/madrasah dikalikan 100%.
23	Perpustakaan			16	Rasio pengunjung perpustakaan	orang/ tahun	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Adalah jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun dibagi dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani (10-59thn).
24	Kesehatan	4.1.2	Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat	1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	Dinas Kesehatan	Adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikalikan 100%.
				2	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	%		Adalah jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikalikan 100%.
				3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%		Adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikalikan 100%.
				4	Cakupan pelayanan nifas	%		Adalah jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikalikan 100%.
				5	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%		Adalah jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah neonatus dengan komplikasi yang ada dengan perkiraan 15 % bayi baru lahir dari satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di sarana pelayanan kesehatan dikalikan 100%.
				6	Cakupan kunjungan bayi	%		Adalah jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar (paling sedikit 4 kali) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikalikan 100 %.
				7	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal child Immunization)	%		Adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun dibagi dengan seluruh Desa/Kelurahan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikalikan 100%.
				8	Cakupan pelayanan anak balita	%		Adalah jumlah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu dibagi dengan jumlah seluruh anak balita (12 – 59 bulan) di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dikalikan 100%.

			9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%		Adalah jumlah anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin yang mendapat MP-ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikalikan 100 %.
			10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%		Adalah jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikalikan 100%.
			11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%		Adalah jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya melalui penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikalikan 100%.
			12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	per 100.000 penduduk		Adalah jumlah kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun yang dilaporkan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah Penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikalikan 100.000.
			13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit pnemonia balita	%		Adalah jumlah penderita Pneumonia Balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita Pneumonia Balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikalikan 100%.
			14	Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif	%		Adalah jumlah pasien baru TB BTA Positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun dibagi dengan jumlah perkiraan pasien baru TB BTA (+) dalam satu wilayah pada waktu satu tahun dikalikan 100%.
			15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani	%		Adalah jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar operasional prosedur (SOP) di satu wilayah dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah dalam waktu satu tahun dikalikan 100%.
			16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	%		Adalah jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita diare pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama dikalikan 100%. (Jumlah perkiraan diasumsikan sebanyak 10% dari angka kesakitan diare dikali jumlah penduduk).
			17	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%		Adalah jumlah kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/ Kelurahan yang ditangani < 24 jam periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah Kejadian Luar biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah Desa/ Kelurahan pada periode waktu yang sama dikalikan 100%.
			18	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	RSUD	Adalah jumlah kunjungan pasien maskin pada sarkes strata 1 selama 1 tahun (lama dan baru) dibagi dengan jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikalikan 100%.
			19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%		Adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarkes strata 2 dan 3 selama 1 tahun (lama dan baru) dibagi dengan jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikalikan 100%.
			20	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%		Adalah jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan gawat level 1 dibagi dengan jumlah RS kabupaten dikalikan 100%.

25	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	4.1.3	Meningkatnya kualitas keluarga kecil sejahtera	1	Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Adalah jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan alat kontrasepsi ditambah jumlah peserta KB baru dibagi dengan jumlah seluruh pasangan usia subur dikalikan 100%. Indikator ini juga digunakan oleh bidang kesehatan dengan nama "cakupan peserta KB aktif", dimana perhitungan rumusnya sama.
				2	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	%		Adalah jumlah petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa/Kelurahan dikalikan 100 %.
26	Kepemudaan dan Olahraga	4.1.4	Meningkatnya peran serta pemuda dan prestasi olah raga	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Adalah jumlah organisasi/kelompok pemuda yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh organisasi/kelompok pemuda dikalikan 100%.
				2	Lapangan olahraga per 1000 penduduk	unit		Adalah jumlah lapangan olahraga milik pemerintah daerah dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 1.000.
27	Sosial	4.2.1	Meningkatnya perlindungan sosial kepada masyarakat	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adalah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dibagi dengan jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikalikan 100%.
				2	Persentase pantli sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%		Adalah jumlah pantli sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos dibagi dengan jumlah pantli sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana kesos dikalikan 100%.
				3	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial jenis lainnya	%		Adalah jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis dibagi dengan jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dikalikan 100%.
				4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%		Adalah jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dibagi dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dikalikan 100%.
				5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Adalah jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun dibagi dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dikalikan 100%.
				6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%		Adalah jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dibagi dengan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dikali 100%.
28	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.2.2	Meningkatnya perlindungan pada perempuan dan anak	1	Rasio KDRT per 1.000 penduduk	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Adalah jumlah kasus KDRT dibagi dengan jumlah rumah tangga dikalikan 1.000.
				2	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%		Adalah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi dengan jumlah pekerja perempuan dikalikan 100%.
				3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%		Adalah jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan dikalikan 100%.
				4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%		Adalah jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dikalikan 100%.

29	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	4.2.3	Terwujudnya masyarakat maju yang berakhlak mulia	1	Rasio tempat ibadah dengan pengantunya	unit	Sekretariat Daerah	Adalah jumlah rumah ibadah dibandingkan dengan 1.000 penduduk.
30	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	5.1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	Peningkatan pendapatan asli daerah	%	DPPKAD	Adalah jumlah PAD tahun ini dikurangi jumlah PAD tahun lalu dibagi dengan jumlah PAD tahun lalu dikalikan 100%.
				2	SKPD pencatatan asetnya tertib	%		Adalah jumlah SKPD yang pencatatan asetnya sesuai peraturan pengelolaan aset dibagi dengan jumlah seluruh SKPD dikalikan 100%.
				3	SKPD menyusun laporan keuangan sesuai SAP	%		Adalah jumlah SKPD yang laporan keuangannya sesuai SAP dibagi dengan jumlah seluruh SKPD dikalikan 100%.
		5.1.2	Meningkatnya kualitas pengawasan	1	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	Inspektorat	Adalah jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun dikalikan 100%.
				2	Temuan hasil pengawasan lainnya yang ditindaklanjuti	%		Adalah jumlah temuan APIP (BPKP, Irjen) yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah temuan APIP (BPKP, Irjen) sampai dengan akhir tahun dikalikan 100%.
				3	SKPD yang meningkat kinerja LAKIP-nya	%		Adalah jumlah SKPD yang kinerja LAKIP-nya meningkat dibagi dengan jumlah seluruh SKPD dikalikan 100%.
31	Kependudukan dan Catatan Sipil	5.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1	Jumlah penduduk ber-KTP	%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Adalah jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah dikalikan 100 %
				2	Bayi berakte kelahiran	%		Adalah jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran dibagi dengan jumlah keseluruhan bayi lahir dikalikan 100%
				3	Kepemilikan Akta kelahiran per 1.000 penduduk	%		Adalah jumlah penduduk yang mempunyai akte kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 1.000.
				4	Persentase pasangan berakte nikah	%		Adalah jumlah pasangan nikah berakte nikah dibagi dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah dikalikan 100%.
32	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	5.1.4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Persentase Raperda yang disetujui DPRD pertahun	%	Sekretariat Daerah	Adalah jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD dalam setahun dibagi dengan jumlah RAPERDA yang diusulkan pada tahun yang sama dikalikan 100%.
				2	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	%	Sekretariat DPRD	Adalah jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2012 x 100%
				3	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	BKD	Adalah jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi dengan jumlah total pejabat yang ada dikalikan 100%.
				4	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%		Adalah jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi dengan jumlah total pejabat yang ada dikalikan 100%.
				5	Persentase izin terbit sesuai standar	%	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Adalah jumlah surat izin yang terbit sesuai standar yang ditetapkan dibagi dengan jumlah seluruh surat izin yang terbit dalam 1 tahun dikalikan 100%.
				6	Tingkat penerapan pengelolaan arsip secara baku	%	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Adalah jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku dibagi dengan jumlah semua SKPD dikalikan 100%.
33	Kearsipan			7	Persentase lahan bersertifikat	%	Sekretariat Daerah	Adalah luas lahan bersertifikat di suatu daerah dibagi dengan luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah dikalikan 100%.
34	Pertanahan							

32	Perencanaan Pembangunan	5.2.1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1	Keselarasn program nasional dengan RPJMD	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Adalah jumlah program RPJMD yang selaras dengan program nasional dibagi dengan jumlah program nasional dikalikan 100%.
				2	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%		Adalah jumlah program RKPD yang selaras dengan program RPJMD dibagi dengan jumlah program RPJMD dikalikan 100%.
				3	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan	%		Adalah dokumen perencanaan yang tersedia dibagi dengan dokumen perencanaan yang seharusnya tersedia pada pemerintah daerah setiap tahun dikalikan 100%. (RPJMD, IKU, RKPD, KUA-PPAS, Penetapan Kinerja)
				4	Tingkat pemenuhan dokumen statistik daerah	%		Adalah dokumen statistik yang tersedia dibagi dengan dokumen statistik yang seharusnya tersedia pada pemerintah daerah setiap tahun dikalikan 100%. (Dokumen statistik yang seharusnya tersedia adalah Buku PDRB, Buku Kabupaten Dalam Angka,)
33	Statistik							
34	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	5.2.2	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	1	Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	Kantor SATPOL PP	Adalah jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dibagi dengan Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dikalikan 100%.
				2	Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	orang		Adalah jumlah Polisi Pamong Praja dibagi dengan Jumlah penduduk dikalikan 10.000.
				3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	KESBANGPOL & LINMAS	Adalah jumlah Pos Siskamling dibagi dengan jumlah desa/kelurahan dikalikan 100 %.
				4	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	orang		Adalah jumlah Linmas dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 10.000.

7 SEKAYU, DESEMBER 2012
BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. PAHRI AZHARI